

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH**
**THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL
PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH
IN CENTRAL JAVA PROVINCE**

Komaedi¹, Hadi Prabowo², Bahrullah Akbar³, Dahyar Daraba⁴, Muh.
Ilham⁵, Mansyur⁶, Ahmad Averus⁷, Udaya Madjid⁸

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹²³⁴⁵⁶⁷⁸

Email: komedi@ipdn.ac.id¹, hadiprabowo@ipdn.ac.id²,
bahrullah.akbar@ipdn.ac.id³, dahyar@ipdn.ac.id⁴, muh.ilham@ipdn.ac.id⁵,
mansyurachmad@ipdn.ac.id⁶, ahmadaverus@ipdn.ac.id⁷,
udaya_madjid@ipdn.ac.id⁸

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: Revised: Approved:	<p><i>Fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama besarnya anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia mengalami hal yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh lebih baik dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga tujuan penelitian adalah untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methode dengan penelitian kuantitatif dilakukan diawal selanjutnya penelitian kualitatif pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2017-2022 sebesar 0.021285 atau 2.1285%, periode 2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, dan</i></p>

How to cite:	Author's name. (2021). Article Title. Journal Eduvest. Vol/(Number): Page
E-ISSN:	2775-3727
Published by:	https://greenpublisher.id/

periode 2020-2022 masa pandemi covid-19 sebesar 0.089764 atau 8.9764%.

KEYWORDS

Kinerja, Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

INTRODUCTION

Otonomi daerah yang dijalankan pemerintah daerah termasuk didalamnya wewenang untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri, diantaranya dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kebutuhan dan potensi daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. APBD akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah, walaupun dipengaruhi oleh variabel lain seperti organisasi, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Keuangan daerah dianggap sebagai aspek penting karena berhubungan dengan mobilitas sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Fidelius, 2013). Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan yang telah dilimpahkan (Saputri, 2019). Kebijakan desentralisasi fiskal menjadi salah satu cara dalam peningkatan efektivitas, efisiensi ekonomi publik sehingga menciptakan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik (Fretes, 2017). Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan menjadi penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah terhadap anggaran mereka. Capaian efektivitas, efisiensi menjadi kunci agar anggaran tersebut dapat mencapai tujuan. Kesuksesan terletak pada respons terhadap tuntutan masyarakat, yang merupakan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam proses alokasi sumber daya publik (Lusiana Selly Kopong, 2016).

Besarnya wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren dan umum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka diterbitkan pula kebijakan untuk mengatur keuangan daerah dengan pemerintah pusat yaitu adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

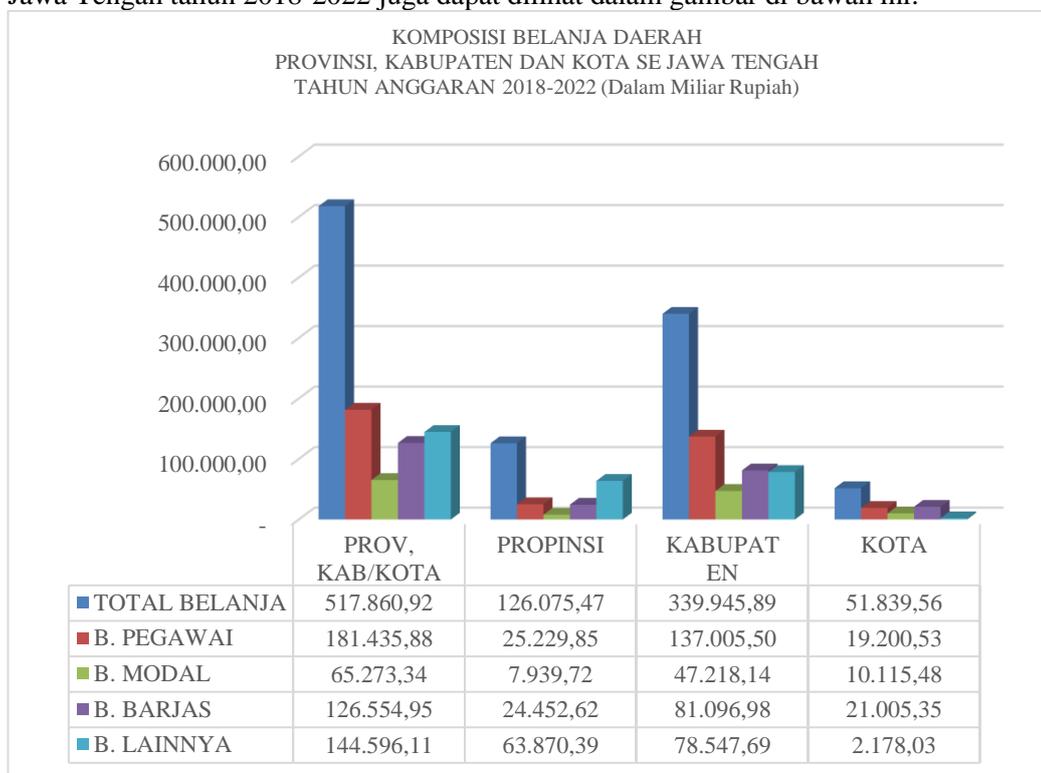
Tabel 1 Perbandingan APBD Tertinggi di Indonesia dengan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

No	Provinsi	APBD (Triliun)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	DKI Jakarta	83,78	4.96
2	Jawa Barat	33,93	5.00
3	Jawa Timur	31,12	4.95
4	Jawa Tengah	26,76	4.98
5	Sumatera Utara	14,27	5.01

Sumber : diolah Penulis dari (Kemenkeu, 2023b)(Bappenas, 2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dengan APBD terbesar berada pada peringkat ke 4 (empat) dari 38 Provinsi. Dari 5 (lima) Provinsi dengan APBD terbesar, Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi di peringkat ke 3 (tiga).

Menurut Hanafi & Harsono (2020), Dalam era otonomi daerah, untuk mendukung keberhasilan keuangan daerah terdapat tiga aspek utama, yaitu pengawasan (oleh masyarakat dan DPRD sebagai fungsi legislatif), pengendalian (oleh pemerintah daerah), dan pemeriksaan (melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi independen terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sesuai standar dan peraturan pemeriksaan). Komposisi belanja daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2022 juga dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber : diolah dari Kemenkeu (2023a)

Gambar 1 Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 s.d 2022

Komposisi belanja daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah terlihat bahwa belanja pegawai menduduki porsi yang terbesar baik tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. rata-rata belanja pegawai sebesar 35,04% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 20,01%, Kabupaten 40,30% dan Kota sebesar 37,04%. Belanja pegawai merupakan pengeluaran antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, insentif, belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, dan honorarium.

Belanja modal rata-rata sebesar 12,60% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 6,30%, Kabupaten 13,89% dan Kota sebesar 19,51%. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki usia manfaat lebih dari 12 bulan.

Rata-rata untuk belanja Barang dan Jasa se Jawa Tengah sebesar 24,44% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 19,40%, Kabupaten 23,86% dan Kota sebesar 40,52%. Belanja barang dan Jasa antara lain diperuntukkan untuk belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau pengadaan, sewa, makanan maupun minuman, pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, pengadaan barang dan jasa, belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain, pelatihan, sosialisasi, bantuan keuangan kepada pihak lain.

Belanja lainnya merupakan pengeluaran yang diperuntukkan antara lain untuk membiayai belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan social. -rata sebesar 27,92% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 50,66%, Kabupaten 23,11% dan Kota sebesar 4,20%.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator seperti inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi pengangguran karena peningkatan produksi akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam indikator perekonomian, seperti tingkat pengangguran, yang menjadi salah satu parameter dalam menilai pembangunan ekonomi suatu negara (Kurniawan, Khilmiana, Arifin, & Maisaroh, 2023)

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018 s.d 2022

NO.	KABUPATEN DAN KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	2,99	2,27	- 10,28	2,15	5,13
2	Kabupaten Banyumas	6,45	6,32	-1,65	4,00	5,86
3	Kabupaten Purbalingga	5,42	5,64	-1,18	3,19	5,41
4	Kabupaten Banjarnegara	5,67	5,6	-1,32	3,26	5,29
5	Kabupaten Kebumen	5,53	5,52	-1,45	3,71	5,79
6	Kabupaten Purworejo	5,33	5,44	-1,61	3,31	5,36
7	Kabupaten Wonosobo	5,06	5,57	-1,64	3,68	5,02
8	Kabupaten Magelang	5,28	5,3	-1,67	3,48	5,46
9	Kabupaten Boyolali	5,72	5,96	-1,20	4,63	6,33
10	Kabupaten Klaten	5,47	5,48	-1,17	3,82	5,90
11	Kabupaten Sukoharjo	5,79	5,92	-1,70	3,82	5,61
12	Kabupaten Wonogiri	5,41	5,14	-1,41	3,35	5,63
13	Kabupaten Karanganyar	5,98	5,76	-1,87	3,57	5,87
14	Kabupaten Sragen	5,75	5,9	-1,81	3,75	5,76
15	Kabupaten Grobogan	5,83	5,37	-1,57	3,78	5,98
16	Kabupaten Blora	4,38	4,05	-4,56	3,68	2,68
17	Kabupaten Rembang	5,89	5,2	-1,49	3,85	5,55
18	Kabupaten Pati	5,71	5,81	-1,16	3,38	5,56
19	Kabupaten Kudus	3,24	3,09	-3,11	-1,54	2,23
20	Kabupaten Jepara	5,85	6,02	-1,92	4,63	5,95

21	Kabupaten Demak	5,4	5,36	-0,23	2,62	5,25
22	Kabupaten Semarang	5,67	5,39	-2,67	3,63	5,31
23	Kabupaten Temanggung	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20
24	Kabupaten Kendal	5,77	5,71	-1,51	3,89	5,69
25	Kabupaten Batang	5,72	5,39	-1,29	4,88	5,97
26	Kabupaten Pekalongan	5,76	5,35	-1,89	3,54	5,11
27	Kabupaten Pemalang	5,69	5,8	-0,61	4,28	5,08
28	Kabupaten Tegal	5,51	5,56	-1,48	3,71	5,14
29	Kabupaten Brebes	5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61
30	Kota Magelang	5,46	5,41	-2,45	3,20	5,77
31	Kota Surakarta	5,75	5,78	-1,76	4,01	6,25
32	Kota Salatiga	5,84	5,9	-1,68	3,35	5,53
33	Kota Semarang	6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73
34	Kota Pekalongan	5,69	5,5	-1,87	3,59	5,76
35	Kota Tegal	5,87	5,77	-2,29	3,12	5,16
36	Nasional	5,17	5,02	2,07	3,69	5,31
	Rata-rata Kab/Kota setiap Th.	5,48	5,43	- 1,94	3,50	5,40
	Rata-rata Kab/Kota	3,57				
	Rata-rata Nasional	4,25				

Sumber : (BPS Jateng, 2024)

Tabel 1.4 menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara Nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018 s.d 2022 sebesar 3,57 di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,25%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan secara nasional sebesar 2,07 dan di Provinsi Jawa Tengah -1,94. Selanjutnya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik yang secara nasional sebesar 3,69 dan di Provinsi Jawa Tengah 3,50. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terlihat telah pulih dengan kisaran tidak jauh dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil periode tertentu dengan periode sebelumnya. Selain itu, melakukan perbandingan dengan indikator-indikator keuangan serupa dari pemerintah daerah lain dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan relatif suatu pemerintah daerah tertentu. Stakeholder yang bertanggung jawab menganalisis rasio keuangan dalam APBD adalah DPRD, Eksekutif, Pemerintah Pusat/Provinsi, serta Masyarakat dan Kreditor. Beberapa rasio untuk menilai data keuangan yang diperoleh dari APBD (Halim, 2001) sebagai berikut:

- Rasio Pertumbuhan Pendapatan
- Rasio Keserasian
- Rasio Kemandirian
- Rasio Efektifitas
- Rasio Efisiensi

Berdasarkan tema penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu berkaitan dengan kinerja keuangan yaitu (Akbar, Mareto,

Adhiem, Firdaus, & Farid, 2023)(Zamzami & Rakhman, 2023)(Nurhayati, Fitriana, Isrowiyah, Zahroh, & Widyani, 2021)(Heldi, 2020)(Welly & Djuniar, 2017)(Susanto, 2019)(Putri & Munandar, 2021), Audit Laporan keuangan yaitu (Utami, Putra, Sutra Tanjung, & Nugroho, 2020)(Hariani & Fakhrorazi, 2022)(Nirwana & Haliah, 2018) (Bakhrullah Akbar, 2015). Sehingga penelitian kinerja keuangan daerah sebelumnya telah banyak dilakukan. Sehingga berdasarkan dengan data diatas bahwa APBD yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah seyogyanya mampu memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

RESEARCH METHOD

Desain penelitian difokuskan dalam menjawab rumusan masalah yaitu untuk menjelaskan (*to describe*) seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode Analisis Data Kuantitatif dilakukan dengan penentuan Spesifikasi Model, Metode Estimasi Model Regresi Data Panel, Penentuan Model Terbaik, Uji Asumsi Klasik, dilanjutkan dengan Teknik analisis meliputi Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), Koefisien Determinasi dan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Eviews. Adapun hipotesis dalam penelitian yaitu H_0 1= Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, H_a 1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi.

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel, dengan objek atau variabel pada penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi (Y1) dan data kinerja keuangan yang terdiri dari pertumbuhan pendapatan (X1), rasio keserasian (X2), rasio kemandirian (X3), rasio efektifitas (X4), dan rasio efisiensi (X5), yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, referensi lainnya berupa buku, artikel penelitian, dan data lainnya. Pengukuran kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada level pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota mulai tahun 2017 s.d 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan metode REM yang telah melalui Metode Analisis Data Kuantitatif dilakukan dengan penentuan Spesifikasi Model, Metode Estimasi Model Regresi Data Panel, Penentuan Model Terbaik, Uji Asumsi Klasik, dilanjutkan dengan Teknik analisis meliputi Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), Koefisien Determinasi dan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) yang dilakukan, maka berikut hasil pengujian hipotesis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Hasil Pengujian Hipotesis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Variabel Independent	Tahun 2017-2022			Tahun 2017-2019			Tahun 2020-2022		
	Hasil	Koef	pValue	Hasil	Koef	pValue	Hasil	Koef	pValue
X1	Berpengaruh (Positif)	0.060458	0.0135	Tidak Berpengaruh	-	0.8764	Berpengaruh (Positif)	0.210142	0.0002
X2	Tidak Berpengaruh	-	0.0926	Tidak Berpengaruh	-	0.3928	Tidak Berpengaruh	-	0.7808
X3	Tidak Berpengaruh	0.036809	0.7165	Tidak Berpengaruh	0.014163	0.1727	Tidak Berpengaruh	0.012549	0.5561
X4	Tidak Berpengaruh	-	0.3197	Tidak Berpengaruh	0.004781	0.8376	Tidak Berpengaruh	0.003606	0.3135
X5	Berpengaruh (Positif)	0.004695	0.0057	Tidak Berpengaruh	-	0.0547	Berpengaruh (Positif)	0.009137	0.0007

Sumber : diolah Penulis dari Eviews (2024)

Berdasarkan tabel diatas, Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Periode Tahun 2017-2022

- 1) Nilai pvalue X1 sebesar 0.013(<0.05), yang artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X1 bernilai positif 0.0604 yang artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.0604 yang artinya semakin meningkatnya X1 rasio pertumbuhan pendapatan akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi
- 2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.09(>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
- 3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.07(>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
- 4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.31(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
- 5) Nilai pvalue X5 sebesar 0.005(<0.05), yang artinya X5 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X5 bernilai positif 0.0668 yang artinya X5 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.0668 yang artinya semakin meningkatnya X5 rasio efisiensi akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.

b. Periode Tahun 2017-2019 (sebelum pandemi covid-19)

- 1) Nilai pvalue X1 sebesar 0.87(>0.05), yang artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.39(>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.17(>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.83(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 5) Nilai pvalue X5 sebesar 0.054(>0.05), yang artinya X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1

c. Periode Tahun 2020-2022 (saat pandemi covid-19)

- 1) Nilai pvalue X1 sebesar 0.0002 (<0.05), yang artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X1 bernilai positif 0.2101 yang artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.2101 yang artinya semakin meningkatnya X1 rasio pertumbuhan pendapatan akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.

- 2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.78 (>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.55 (>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.31(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
- 5) Nilai pvalue X5 sebesar 0.007(<0.05), yang artinya X5 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X5 bernilai positif 0.1411 yang artinya X5 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.1411 yang artinya semakin meningkatnya X5 rasio efisiensi akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4 Rincian Hasil Pengujian Hipotesis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Hasil	<i>Adjusted R-squared</i>
Tahun 2017-2022	Berpengaruh	0.021285
Tahun 2017-2019	Berpengaruh	0.021300
Tahun 2020-2022	Berpengaruh	0.089764

Sumber : diolah Penulis dari Eviews (2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan besarnya pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dari hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*), dengan memperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebagai berikut:

- a. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2022 sebesar 0.021285 atau 2.1285%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak terdapat pada model.
- b. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya yang tidak terdapat pada model.
- c. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2022 masa pandemi covid-19 sebesar 0.089764 atau 8.9764%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak terdapat pada model.

CONCLUSION

Besarnya pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dapat digambarkan dari hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*), sebagai berikut:

- a. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama periode 2017-2022 sebesar 0.021285 atau 2.1285%, yang artinya kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan trefisiensi secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah sebesar 2,1285%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.

- b. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama periode 2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, yang artinya kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan pendapatan, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah sebesar 2.13%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.
- c. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama periode 2020-2022 masa pandemi covid-19 sebesar 0.089764 atau 8.9764%, yang artinya kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan pendapatan, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah sebesar 8.9764%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.

Adapun saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor, diluar faktor kinerja keuangan daerah, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

REFERENCES

- Akbar, M. F., Mareto, I., Adhiem, A. F. A., Firdaus, A. D., & Farid, A. M. B. M. (2023). The Financial Balance Policy Between Central and Local Government: Toward More Just Financial Allocation. *Yuridika*, 38(2), 415–430. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.42904>
- Bakhrullah Akbar, A. D. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013.
- Bappenas. (2023). Laju Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved from <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>
- BPS Jateng. (2024). *Kemiskinan 2017-2022*. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>
- Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 1(1), 2088–2096. <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.1879>
- Frete, P. N. de. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4(1), 31–37.
- Hariani, S., & Fakhrorazi, A. (2022). The Zeitgeist of “Financial Reporting Quality” Predictors: An Empirical Study among Local Governments (Districts) in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 137–147. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100115>
- Heldi, Y. Z. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 165–175. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Kemenkeu, D. (2023a). Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020-

2022.

- Kemenkeu, D. (2023b). Perbandingan alokasi APBN untuk Pusat dan Daerah Tahun 2020-2022. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Kurniawan, P. C., Khilmiana, N., Arifin, S., & Maisaroh, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekalongan. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 5(1), 95–103. <https://doi.org/10.46772/jecma.v5i1.955>
- Lusiana Selly Kopong. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara).
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Nurhayati, N., Fitriana, R., Isrowiyah, A., Zahroh, F., & Widyani, I. P. (2021). Does Wealth Levels, Reliance and Leverage Influence Financial Performance? *Quality - Access to Success*, 22(185), 177–183. <https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.24>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Saputri, S. . (2019). *Prinsip Money Follow Program Dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Provinsi Lampung*. Skripsi.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Utami, F. L., Putra, Y. M., Sutra Tanjung, P. R., & Nugroho, L. (2020). Analysis of audit opinion of financial statements from state institutions: Indonesia empirical study, period 2012-2017. *International Journal of Financial Research*, 11(5), 150–160. <https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N5P150>
- Welly, W., & Djuniar, L. (2017). Kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1–21. <https://doi.org/10.24912/je.v22i1.178>
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>